

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Literatur

- Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Ed. Revisi, Cet.3*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Konstitusi Press, 2012, *Demokrasi Lokal Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Press.
- M. Gaffar, Jenedjri, 2012, *Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta:Konstitusi Pers.
- HR, Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi, Cet Ke-6*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta:Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Thaib et.al, Dahlan, 2012, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Pers.
- Syahruri, Taufiqurrahman, 2004, *Hukum Konstitusi dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Bogor:Ghalia Indonesia.
- _____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida Indrati, Maria, 2007,*Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta:Kanisius.
- Ibrahim, Jhonny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Normatif*, Malang: Bayumedia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005,*Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- MD, Mahfud, 2010,*Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Projodikoro,Wirjono, 1983,*Azas-Azas Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.

- Syahuri, Taufiqurrahman, 2004, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Thaib, Dahlan, et.al, 2012, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- MD, Mahfud, 2009, *Rambu Pembatas dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Gatara, Sahid Asep dan Subhan Sofhian, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung : Fokus Media.
- Herdiawanto, Heri, dan Hamdayama, Jumanta, 2010, *Cerdas Kritis dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta : Erlangga
- Ubaidillah, A, dkk, 2007, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani, Edisi Revisi*, Jakarta : ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Latif, Abdul, 2007, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Yogyakarta.
- Marzuki, Laica, 2005, *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Fakhri, Mustafa, 2005, *Komplikasi Ketentuan Konstitusi, Undang-undang dan Peraturan di 78 Negara*, Jakarta : Mahkamah Konstitusi Pers.
- Siahaan, Maruari, 2002, *The Struggle For Constitutional Justice in Post-Communist Europe*.
- Asshiddiqie, Jimly, dkk., 2004, *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*, Jakarta
- Siahaan, Maruari, 2005, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sutyoso, Bambang, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press
- Widodo, Heru, 2015, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada Serentak di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Sinar Grafika.

Disertasi

H. Azhary, 1993, *Negara Hukum Indonesia Suatu Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, Disertasi, Universitas Indonesia.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Kamus:

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1>
diakses tanggal 1 Maret 2016.

Jimly Asshiddiqie, Kedudukan Mahkamah Konstitusi,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/23/KEDUDUKAN_MK.doc
diakses tanggal 1 Maret 2016.

Saldi Isra, 2010, Negative Legislator, <http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/302-negative-legislator.html>